

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

REFORMASI SUBSIDI BBM TEPAT, PENINGKATAN DEFISIT APBN DAPAT DIHAMBAT

Rastri Paramita



Reformasi subsidi BBM mutlak dibutuhkan agar alokasi belanja negara dapat lebih produktif. Bentuk reformasi subsidi BBM dalam konteks kebijakan fiskal dapat berupa subsidi langsung maupun subsidi tidak langsung. Salah satu bentuk dari subsidi langsung adalah mengganti subsidi barang ke orang atau target grup. Subsidi orang atau target grup akan menempatkan peran subsidi sesuai marwahnya yaitu salah satunya sebagai pemerataan pembangunan. Sedangkan bentuk subsidi tidak langsung dapat berupa perbaikan kebijakan di hulu migas, di antaranya pemberian insentif, perbaikan perijinan, dan kemudahan pembebasan lahan. Reformasi dari sisi hulu bukan hal yang mudah dan murah, namun efeknya dapat dirasakan dalam jangka panjang serta akan memengaruhi ketahanan energi Indonesia.

Subsidi BBM selalu menjadi isu krusial setiap tahun, hal ini dikarenakan subsidi BBM mengambil porsi cukup besar pada belanja negara yaitu pada tahun 2022 mencapai 11,27%. Namun dalam realisasinya, kerap kali terjadi kebocoran. Fluktuasi harga komoditi minyak dan gas bumi (migas) serta kondisi produksi migas Indonesia yang cenderung mengalami penurunan akibat belum ditemukan cadangan minyak baru dengan kapasitas besar, menjadi bagian dari tantangan dalam pelaksanaan subsidi BBM.

Perbaikan data penerima subsidi BBM baik dengan mekanisme pendataan ulang maupun melalui integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat menjadi alternatif reformasi subsidi BBM dari komoditi ke orang atau grup tertentu. Reformasi subsidi BBM yang belum menjadi perhatian serius pemerintah adalah melakukan strategi subsidi tidak langsung melalui perbaikan pengelolaan di hulu migas. Perlunya memperbaiki daya tarik investasi migas karena keekonomian proyek semakin menurun secara signifikan dan terdapat potensi kehilangan peluang dalam mengembangkan undeveloped discovery. Dibutuhkan skema bisnis baru untuk enhanced oil recovery (EOR), rezim fiskal dan non fiskal yang friendly bagi investor guna mendorong kegiatan eksplorasi masif.

SKK Migas telah melakukan simulasi untuk menganalisis alternatif kebijakan insentif pajak tidak langsung dan keekonomian pada industri hulu migas dengan rezim cost recovery dan gross split di mana based line yang digunakan adalah kondisi saat ini. Hasilnya antara lain dengan membebaskan indirect tax, mampu menurunkan cost deductible mencapai 688,3% sehingga lebih efisien bagi kontraktor, meningkatkan potensi penerimaan PPH bagi pemerintah sebesar 60,4%, menghasilkan Gross Operating Income paling tinggi bagi pemerintah yaitu sebesar 375,8% serta lebih kecilnya additional split (discretion) yaitu sebesar 11% yang harus diberikan kepada kontraktor jika dibandingkan tanpa pembebasan indirect tax.